



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

PENGUMUMAN

NOMOR : 21/SEK/PENG.KP1.1.6/X/2026

TENTANG

PENGISIAN JABATAN KESEKRETARIATAN
PADA SATUAN KERJA BARU PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2026

Menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/1408/M.KT.01/2026 tanggal 22 September 2026 hal Persetujuan Izin Operasional 13 (tiga belas) Pengadilan Tingkat Pertama dan dalam rangka mendukung percepatan proses operasional pengadilan tersebut dalam memberikan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan, maka perlu dilakukan pengisian jabatan kesekretariatan pada pengadilan tingkat pertama tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding agar dapat mengusulkan pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan kesekretariatan.

I. DAFTAR JABATAN

Satuan Kerja	Jabatan	Eselon	Jumlah
Pengadilan Negeri			
1. Pengadilan Negeri Kabupaten Badung	1. Sekretaris;	IVa	1
	2. Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;	IVb	1
2. Pengadilan Negeri Kabupaten Sumbawa Barat	3. Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;	IVb	1
	4. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan;	IVb	1
3. Pengadilan Negeri Kabupaten Bangka Selatan	5. Analis Perkara Peradilan;	-	3
	6. Penata Layanan Operasional;	-	3
4. Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Mentawai	7. Pengadministrasi Perkantoran;	-	3
	8. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama;	-	1
5. Pengadilan Negeri Kota Subulussalam	9. Pranata Komputer Ahli Pertama;	-	1
	10. Arsiparis Terampil;	-	2
6. Pengadilan Negeri Kabupaten Morowali.	11. Pranata Keuangan APBN Terampil/Mahir/Penyelia.	-	1
7. Pengadilan Negeri Kabupaten Sukamara			



Satuan Kerja	Jabatan	Eselon	Jumlah
Jumlah per Pengadilan Negeri			18

Satuan Kerja	Jabatan	Eselon	Jumlah
Pengadilan Agama			
1. Pengadilan Agama Kabupaten Lombok Utara	1. Sekretaris;	IVa	1
	2. Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;	IVb	1
2. Pengadilan Agama Kabupaten Buton Tengah	3. Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;	IVb	1
	4. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan;	IVb	1
3. Pengadilan Agama Kabupaten Buton Utara	5. Analis Perkara Peradilan;	-	3
	6. Penata Layanan Operasional;	-	3
	7. Pengadministrasi Perkantoran;	-	3
	8. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama;	-	1
4. Pengadilan Agama Kabupaten Bangka Selatan	9. Pranata Komputer Ahli Pertama;	-	1
	10. Arsiparis Terampil;	-	2
5. Pengadilan Agama Kabupaten Kepulauan Melawai	11. Pranata Keuangan APBN Terampil/Mahir/Penyelia.	-	1
Jumlah per Pengadilan Agama			18

Satuan Kerja	Jabatan	Eselon	Jumlah
Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi	1. Sekretaris;	IVa	1
	2. Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;	IVb	1
	3. Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;	IVb	1
	4. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan;	IVb	1
	5. Analis Perkara Peradilan;	-	3
	6. Penata Layanan Operasional;	-	3
	7. Pengadministrasi Perkantoran;	-	3
	8. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama;	-	1
	9. Pranata Komputer Ahli Pertama;	-	1
	10. Arsiparis Terampil;	-	2
	11. Pranata Keuangan APBN Terampil/Mahir/Penyelia.	-	1
Jumlah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi			18

II. PERSYARATAN JABATAN

Persyaratan perpindahan pejabat/pegawai dalam jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah



Agung Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

III. PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Persyaratan administrasi bagi pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas, sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar dari Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
 - b. Hasil baperjakat oleh Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding.
2. Persyaratan administrasi bagi pengisian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar dari Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
 - b. Hasil baperjakat oleh Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
 - c. Asli surat permohonan mutasi dari yang bersangkutan.

IV. PROSEDUR DAN TATA CARA PENGUSULAN

Pengusulan pengisian jabatan dilakukan dengan prosedur dan tata cara sebagai berikut:

1. Ketua/kepala pengadilan tingkat pertama mengusulkan daftar pejabat/pegawai yang akan diusulkan untuk mengisi jabatan pada satuan kerja baru kepada kepala pengadilan tingkat banding beserta surat pengantar dan hasil baperjakat pada pengadilan tingkat pertama.
2. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding mengolah usulan dari pengadilan tingkat pertama melalui tim baperjakat pengadilan tingkat banding.
3. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding mengusulkan daftar pejabat/pegawai yang akan diusulkan untuk mengisi jabatan pada satuan kerja baru kepada Sekretaris Mahkamah Agung c.q. Kepala Biro Kepegawaian beserta dengan dokumen administrasi pendukungnya melalui link <https://bit.ly/PengisianJabatanSatuanKerjaBaru> paling lambat tanggal 28 Oktober 2026.
4. Dokumen administrasi dijadikan dalam 1 (satu) file dengan format *pdf* dan ukuran maksimal 10 MB.
5. Kepala Biro Kepegawaian mengolah usulan dari Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding untuk disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung.
6. Sekretaris Mahkamah Agung melalui tim baperjakat mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan pegawai pada satuan kerja asal dan/atau satuan kerja yang dituju.
7. Hasil baperjakat Mahkamah Agung akan diumumkan melalui *website* <https://www.mahkamahagung.go.id> .



V. JADWAL PELAKSANAAN

No	Uraian	Tanggal*
1	Pengumuman pembukaan	13 Oktober 2026
2	Pengusulan kepada Sekretaris Mahkamah Agung	14 s/d 28 Oktober 2026
3	Pengolahan usulan	26 Oktober s/d 6 November 2026
4	Pelaksanaan baperjakat oleh Mahkamah Agung	16 s/d 20 November 2026
5	Pengumuman hasil baperjakat satuan kerja baru	23 November 2026
6	Penyusunan SK promosi dan mutasi	23 s/d 25 November 2026
7	Distribusi SK promosi dan mutasi melalui SIKEP	26 s/d 27 November 2026

*) Jadwal bersifat tentatif

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pengusulan pejabat/pegawai wajib memperhatikan ketersediaan pegawai di satuan kerja asal sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi pada satuan kerja.
2. Satuan kerja yang mengusulkan pengisian jabatan administrator dan pengawas pada satuan kerja baru, wajib mengusulkan pengganti dari pejabat tersebut dan tidak diperkenankan terdapat jabatan yang kosong setelah dilakukan promosi/mutasi pegawai.
3. Dalam hal mendapatkan pejabat yang memiliki kompetensi dan integritas yang dibutuhkan oleh organisasi, Sekretaris Mahkamah Agung selaku PPK dapat mengikutsertakan kandidat lain yang tidak diusulkan oleh Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dengan memperhatikan persyaratan administrasi dan persyaratan khusus (pengalaman jabatan) yang telah ditentukan.
4. Dalam pengisian jabatan ini **TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN;**
5. Setiap perkembangan informasi pengisian jabatan ini disampaikan melalui website resmi <https://www.mahkamahagung.go.id/> .

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Oktober 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh: Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Sobandi
---	---

